

BAB IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

4.1. Permasalahan Pembangunan

Memasuki usianya yang ke-55 pada tahun 2013, provinsi NTB telah mencatat sejumlah kemajuan dalam mensejahterakan masyarakatnya, melalui program pembangunan yang terarah, terencana, sistematis dan sinergis. Indikator pembangunan pada 5 tahun terakhir menunjukkan kemajuan di berbagai aspek kesejahteraan masyarakat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai salah satu ukuran kesejahteraan telah berada pada momentum percepatan yang signifikan, dengan *shortfall* (progress) terbaik ke-4 pada tahun 2012. Sejumlah tantangan pembangunan masih dihadapi ke depan dan perlu penanganan lebih baik. Permasalahan pembangunan yang akan dihadapi oleh masyarakat NTB secara umum, adalah bagaimana membangun masyarakat yang berkarakter, mengembangkan budaya dan kearifan lokal, melakukan reformasi birokrasi dan penegakan hukum, mengembangkan SDM yang berdaya saing, pengentasan kemiskinan, pengembangan konektifitas antar wilayah dan tata ruang, serta pengelolaan lingkungan hidup.

4.1.1. Masyarakat yang Beriman dan Berkarakter

Permasalahan penguatan keimanan dan pengembangan karakter masyarakat NTB adalah :

1. Sistem pendidikan berkarakter kurang terbangun. Sistem pendidikan yang berjalan saat ini belum sepenuhnya menjawab kebutuhan anak didik yang hidup di era globalisasi. Selama tahun 2013, ada 58 laporan kasus korban kekerasan terhadap anak, dan di satu LP pada 2013 menahan 22 anak karena tersangkut pencurian, pencabulan, penganiayaan, hingga pembunuhan. Sex pra nikah juga dilaporkan mulai merebak di perkotaan dan lokasi wisata, dimana diantaranya dilakukan oleh siswa dan mahasiswa.
2. Peredaran dan penyalahgunaan narkoba cenderung meningkat. Posisi Provinsi NTB sebagai daerah tujuan wisata dan mobilitas tenaga kerja ke luar negeri telah memungkinkan pesatnya perkembangan peredaran NAPZA. Saat ini tercatat 59.350 warga NTB yang terindikasi menyalahgunakan narkoba, diantaranya seribu orang sudah terindikasi menjadi pecandu narkoba. BNN juga mencatat, sebanyak 19 ribu warga NTB telah terindikasi mejadi pemakai narkoba teratur.

3. Perkelahian pelajar, antar kampung, antar RT, antar desa masih terjadi sebagai akibat dari interaksi dan kesenjangan di bidang ekonomi, sosial dan SARA. Meskipun terus menurun, ancaman konflik baik vertikal maupun horizontal akan berdampak pada kinerja pembangunan di daerah ini. Pada tahun 2008 jumlah konflik sebanyak 285 kasus, tahun 2009 sebanyak 189 konflik, tahun 2010 sedikitnya 161 konflik serta tahun 2011 sampai dengan Agustus sebanyak 64 konflik.

4.1.2. Pengembangan Budaya dan Kearifan Lokal

Pengembangan budaya dan kearifan lokal dihadapkan kepada beberapa permasalahan :

1. Pelestarian nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi, kehidupan seni, bahasa dan sastra asli NTB belum optimal. Pesan, petuah adat, hikmah dan kearifan lokal yang tergalai dari kisah-kisah sejarah local NTB, seperti yang tertuang dalam lontar (*takepan sasak*) belum dilestarikan secara memadai.
2. Masih lemahnya perlindungan hukum bagi semua aset kebudayaan baik yang fisik maupun non fisik dalam bentuk hak atas kekayaan intelektual bangsa. Sejumlah kasus penjualan benda bersejarah asal NTB berhasil diselamatkan. Diantaranya yang dijual kepada turis asing dan menjadi koleksi sejumlah artshop di luar negeri.
3. Sarana dan prasarana pengembangan kebudayaan belum memadai.
4. Aktualisasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam pembangunan belum optimal. Budaya Sasak, Samawa dan Mbojo berkembang dalam lingkup yang terbatas, seperti pada even-even budaya (festival, temu budaya, pameran, kurikulum lokal bahasa daerah, dll), dan belum secara sistematis diaktualisasi dalam program pembangunan di daerah ini.

4.1.3. Reformasi Birokrasi dan Penegakan Hukum

Dalam melaksanakan reformasi birokrasi dan penegakan hukum di provinsi NTB, permasalahan yang dihadapi, adalah:

1. Partisipasi politik menurun

Tingkat partisipasi masyarakat dalam politik dalam 5 tahun terakhir cenderung menurun. Pada Pilpres tahun 2009 tercatat tingkat partisipasi politik sebesar 75,7 %, pada Pemilukada 2010 sebesar 73,42 % dan pada Pemilukada 2013 sebesar 70,47%.

2. Kualitas pelayanan publik belum optimal

Kualitas pelayanan publik (kesehatan, pendidikan, tenaga kerja, sosial dan beberapa sektor publik lainnya) masih dirasakan belum optimal. Keluhan masyarakat melalui berbagai media cetak, elektronik, dan media sosial masih terjadi dan telah direspon oleh pemerintah daerah. Hal ini dilatarbelakangi oleh kurangnya sarana prasarana, SDM dan prosedur pelayanan publik. Peningkatan kapasitas pelayanan pemerintah berbasis elektronik dan internet (electronic Government, e-Gov) belum optimal.

3. Gangguan keamanan ketertiban masyarakat berlatar belakang SARA masih terjadi. Sepanjang tahun 2009-2012 telah terjadi 307 kasus konflik vertikal (2009-2012) dan 233 kasus konflik horizontal (2009-2012).

4. Ketidakpastian hukum

Akses layanan dan perlindungan hukum bagi semua masyarakat belum merata. Di sisi pemerintah, kapasitas dan kapabilitas pemerintah dalam menyelesaikan berbagai kasus hukum di daerah masih kurang, dan di sisi masyarakat, pemahaman kesadaran dan budaya hukum belum optimal. Kasus curanmor di wilayah NTB tergolong tinggi, dan sepanjang 2012 tercatat dalam laporan kepolisian sebanyak 2.450 kasus, dari total kejahatan konvensional sebanyak 10.689 kasus. Penyelesaian kasus curanmor itu juga belum signifikan, karena baru 499 kasus yang terselesaikan sampai ke pengadilan, dari 2.450 kasus yang mencuat sepanjang 2012 atau sebanyak 20,3 %.

4.1.4. Sumberdaya Manusia yang Berdayasaing

1. Peran perempuan di pedesaan belum optimal

Peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan terutama dalam struktur pemerintahan dan organisasi politik belum optimal. Khususnya peran perempuan di pedesaan perlu terus diupayakan, karena permasalahan seperti *trafficking* (perdagangan) perempuan dan anak, dan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak masih banyak terjadi, terutama di pedesaan.

2. Derajat kesehatan ibu dan anak masih rendah

Derajat kesehatan masyarakat yang direpresentasi oleh angka kematian bayi (57 per 1000 kelahiran hidup, SDKI 2012), angka kematian ibu (242 per 100.000 kelahiran hidup, Dikes NTB 2012), prevalensi gizi buruk (3,52 %, Dikes NTB 2012) dan kualitas sanitasi/lingkungan masih perlu ditingkatkan. Kesenjangan antar kabupaten/kota masih cukup besar. Perilaku budaya hidup bersih dan sehat di kalangan masyarakat menuju derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik belum berkembang. Hal lain yang juga dirasakan adalah mutu layanan kesehatan belum sepenuhnya sesuai dengan standar nasional.

3. Pengangguran tenaga terdidik masih tinggi

Pengangguran tenaga terdidik menunjukkan masih lemahnya kualitas SDM di provinsi NTB. BPS Provinsi NTB mencatat pada 2013 tingkat pengangguran terbuka (TPT) terendah penduduk berpendidikan SMP, yaitu sebesar 3,27 persen dan yang tertinggi pada jenjang pendidikan universitas, yakni 8,73 persen. Pendidikan dan keterampilan yang ada saat ini belum sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Di pihak lain, dirasakan belum optimalnya pengembangan semangat kewirausahaan bagi penduduk usia kerja agar mampu bekerja secara mandiri dan menciptakan lapangan kerja baru.

4. Kualitas sarana prasarana pendidikan masih kurang

Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau masyarakat belum terwujud sepenuhnya. Hal ini disebabkan antara lain oleh belum optimalnya sarana prasarana pendidikan, khususnya di daerah terpencil dan tertinggal. Fasilitas/sarana penunjang pendidikan termasuk pengembangan perpustakaan dan laboratorium sebagai sarana minat dan budaya baca belum memadai. Pada dimensi kebutuhan masa depan, pendidikan berbasis teknologi informasi dan pendidikan berbasis kearifan lokal yang berwawasan global masih kurang.

5. Angka kelahiran total

Angka kelahiran total provinsi NTB relative masih tinggi, yaitu 2,8 (SDKI, 2012). Persoalan ini akan berdampak pada pertambahan dan kualitas penduduk serta penyediaan pemenuhan kebutuhan pokok penduduk.

6. Penyandang masalah kesejahteraan sosial masih tinggi

Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial masih cukup tinggi. Hal ini disebabkan oleh belum maksimalnya jangkauan, mutu dan akses pelayanan sosial dasar. Sementara itu, sistem jaminan sosial masyarakat yang berkelanjutan belum berkembang maksimal.

7. Peredaran dan penyalahgunaan narkoba meningkat

Dengan meningkatnya intensitas migrasi sosial antar daerah dan antar negara, berimplikasi pada makin meluasnya peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Daerah NTB sebagai salah satu tujuan wisata dan tingginya *turnover* TKI/TKW turut berkontribusi pada meluasnya penggunaan dan peredaran NAPZA ini.

4.1.5. Kemiskinan

1. Ketimpangan struktur ekonomi daerah dari sektor pertanian ke sektor jasa (sektor industri olahan belum berkembang)

Seiring dengan berkembangnya sektor jasa, sektor produksi (pertanian, peternakan, pangan, dan lain-lain) mendapat tantangan yang serius, terutama

dari para pesaing luar daerah, bahkan luar negeri di era APEC. Sektor industri olahan perlu ditopang dengan pengembangan keterampilan, bantuan modal dan pemasaran sehingga dapat bersaing dengan daerah lain dan mempunyai nilai tambah terhadap perekonomian masyarakat.

2. Nilai tukar petani rendah

Secara nasional, nilai tukar petani (NTP) mengalami penurunan dari 104,58 per Juli 2013 menjadi 104,32 per Agustus 2013. Penurunan NTP diakibatkan oleh penurunan pada empat subsektor yaitu subsektor tanaman pangan, hortikultura tanaman perkebunan rakyat dan peternakan. Untuk provinsi NTB, besar nilai tukar petani adalah 93,66. Ini berarti mengalami peningkatan 0,55persen bila dibandingkan dengan bulan Juli 2013 dengan nilai tukar petani sebesar 93,11. Namun demikian angka ini berfluktuatif dari waktu ke waktu, dan perlu diantisipasi untuk menjamin kesejahteraan petani.

3. Pengembangan produk olahan lokal masih kurang

Saat ini, terjadi pergeseran pola konsumsi pangan masyarakat dari pangan lokal (ubi kayu, jagung dan sagu) ke beras. Masuknya produk pangan olahan dari luar mempengaruhi pola konsumsi serta produksi pangan lokal. Pengembangan produk olahan lokal di NTB memerlukan dukungan pengembangan teknologi proses dan pengolahan serta strategi pemasaran yang baik untuk mengubah image pangan inferior menjadi pangan normal bahkan superior.

4. Mekanisme penyaluran modal yang belum tepat

Pelaku UMKM di provinsi NTB masih dihadapi kendala seperti minimnya dukungan pembiayaan karena aksesnya yang terbatas kepada lembaga perbankan. Keterbatasan akses ini dipicu oleh terbatasnya akses informasi permodalan, SDM, birokrasi dan manajemen UKM, sehingga penyaluran modal menjadi tidak tepat sasaran. Keterbatasan modal kurang mendorong petani dan nelayan untuk menerapkan teknologi baru dalam meningkatkan produktivitas, membatasi peningkatan nilai tambah, dan mengakibatkan ketergantungan pada penyediaan modal informal (pengijon).

5. Database Industri Kecil dan Menengah

Karena keterbatasan penguasaan teknologi, maka database IKM belum tersedia di semua kabupaten / kota.

6. Potensi peternakan untuk swasembada daging

Provinsi NTB sebagai salah satu daerah produsen sapi nasional, akan bergerak menjadi daerah swasembada daging. Konsekuensinya, perlu terus dilakukan peningkatan populasi ternak melalui berbagai program inovasi dan teknologi.

7. Tidak sebandingnya antara jumlah angkatan kerja dengan kesempatan kerja Provinsi NTB masih menghadapi permasalahan yang ditandai dengan angka pertumbuhan kesempatan kerja yang tidak sebanding dengan angka pertumbuhan angkatan kerja. Pengangguran terbuka tahun 2012 sebesar 5,26%.
8. Nilai tambah produk unggulan masih rendah
Sub sektor perkebunan, peternakan dan perikanan sebagai produk unggulan telah tumbuh signifikan dalam 5 tahun terakhir. Namun demikian, nilai tambah komoditas ini masih rendah karena pada umumnya ekspor dilakukan dalam bentuk segar (produk primer) dan olahan sederhana. Peningkatan nilai tambah produk pertanian dan perikanan melalui proses pengolahan memerlukan investasi dan teknologi pengolahan yang lebih modern. Kondisi ini diperberat oleh semakin tingginya persaingan produk dari luar negeri, baik yang masuk melalui jalur legal maupun ilegal.
9. Ketimpangan layanan infrastruktur dan utilitas antar wilayah pulau
Pembangunan infrastruktur telah menjadi prioritas, terutama infrastruktur perhubungan. Namun demikian, layanan dan utilitas infrastruktur tersebut dirasakan masih belum optimal, terutama oleh masyarakat yang ada di pedesaan, wilayah pulau kecil terpencil. Layanan yang dirasakan masih kurang adalah layanan telekomunikasi, pendidikan, kesehatan dan pelayanan sosial lainnya.
10. Ketimpangan pertumbuhan antar kawasan, antar kota, antar wilayah
Ketimpangan pembangunan antarwilayah dapat dilihat dari perbedaan tingkat kesejahteraan dan perkembangan ekonomi antar kawasan, antar kota dan antar wilayah. Beberapa indikator yang menunjukkan masih adanya ketimpangan tersebut, antara lain disparitas angka kemiskinan, ketimpangan pelayanan sosial dasar yang tersedia, seperti pendidikan, kesehatan dan air bersih.

4.1.6. Konektifitas antar wilayah dan Tata Ruang

1. Keterhubungan antar kawasan, antar kota, antar daerah di dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat maupun keterhubungan antara Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan provinsi/daerah lainnya di Indonesia maupun keterhubungan dengan Negara lain yang berdekatan masih lemah. Keberadaan sarana prasarana transportasi udara bertaraf internasional adalah peluang mengembangkan konektifitas antar kawasan di luar Provinsi NTB, demikian pula keberadaan pelabuhan laut yang harus terus dikembangkan

guna mendukung pergerakan barang dan orang menuju dan dari Provinsi NTB. Kemantapan jalan nasional dan jalan provinsi, ketersediaan sarana dan prasarana transportasi darat serta keberadaan pelabuhan penyeberangan adalah modal penting dalam membangun konektivitas yang tinggi dalam wilayah Provinsi NTB sendiri.

2. Sarana prasarana pelayanan publik (sosial dasar) belum memadai

Sarana prasarana pelayanan publik (sosial dasar) di provinsi NTB masih perlu ditingkatkan. Sarana prasarana pendidikan (sekolah beserta kelengkapannya seperti buku, alat peraga), sarana prasarana kesehatan (Poskesdes, Puskesmas), pelayanan sosial (panti sosial), utamanya di daerah terpencil, pulau-pulau kecil, pegunungan masih terbatas. Disparitas antara kota dan perdesaan masih terlihat.

3. Kualitas lingkungan pemukiman masih rendah

Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana permukiman baik dari segi perumahan maupun lingkungan permukiman yang terjangkau dan layak huni belum sepenuhnya dapat dipenuhi, baik oleh masyarakat maupun pemerintah.

4. Sengketa lahan dan tanah terindikasi terlantar

Kasus pertanahan di NTB dibidang masih tinggi. Ragam kasus didominasi dengan sengketa kepemilikan atas areal pertanahan.

Luas tanah terlantar di Nusa Tenggara Barat berdasarkan data inventarisasi dan verifikasi tahun 2012 seluas 25 ribu hektar lebih. Tanah yang terindikasi terlantar itu tersebar di seluruh wilayah kabupaten/ kota. Penelantaran ini sebagian besar disebabkan oleh belum berjalannya aktifitas perusahaan/ investor di lahan tersebut. Sejak 2002, tercatat sebanyak 146 perusahaan atau lembaga berbadan hukum menelantarkan 187 bidang tanah yang luasnya mencapai 25.022 ha lebih.

4.1.7. Lingkungan Hidup

1. Perilaku hidup bersih dan sehat masih kurang

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di NTB masih belum optimal. Data tahun 2009 menyebutkan bahwa baru 64,41% sarana yang telah dibina kesehatan lingkungannya, yang meliputi institusi pendidikan (67,52%), tempat kerja (59,15%), tempat ibadah (58,84%), dan fasilitas kesehatan (77,02%).

2. Degradasi hutan dan lahan (*illegal logging, illegal mining*)

Degradasi hutan dan lahan antara lain disebabkan oleh aktifitas pertanian (agrikultur), pertambangan dan pembukaan lahan untuk jalan. Di NTB, degradasi hutan banyak disebabkan oleh aktifitas penebangan liar dan

tambang yang berdampak pada menipisnya jumlah mata air. Aktifitas pertambangan di Sumbawa Barat, Sumbawa, Bima dan Lombok Barat selain memberi dampak ekonomis bagi penduduk sekitar, juga telah mengurangi jumlah hutan tutupan serta hutan/lahan produktif lainnya.

3. Ruang kota belum tertata dengan baik

Ruang terbuka hijau serta ruang publik di kota-kota di provinsi NTB, saat ini kondisinya belum tertata baik. Padahal ketersediaan ruang terbuka hijau atau ruang publik seharusnya 30 persen dalam satu wilayah. Penataan yang perlu mendapat perhatian antara lain : kelengkapan kota (listrik, air, gas, limbah, sampah), tata air (pencegahan banjir), perhubungan, lingkungan perumahan/pemukiman, tata ruang dan tata bangunan.

4. Daerah rawan bencana

Wilayah provinsi NTB termasuk daerah rawan bencana. Selama kurun waktu lebih kurang tiga puluh tahun wilayah NTB telah kerap kali mengalami bencana geologi yang berupa gempa bumi dan tsunami, letusan gunung api, tanah longsor, dan amblesan tanah (*subsidence*). Bencana banjir dan tanah longsor juga sering terjadi. Tercatat daerah yang selama ini rawan bencana seperti tanah longsor di Pulau Lombok yakni Sembalun dan Belanting (Lombok Timur), Pusuk (Lombok Utara) dan Sekotong (Lombok Barat), di Labuhan dan Sumbawa Besar, Kabupaten Sumbawa. Sementara itu, kawasan rawan banjir antara lain Lombok bagian selatan (Kabupaten Lombok Timur), Praya Barat (Lombok Tengah), Pogading (Lombok Timur), Taliwang (Sumbawa Barat), Dompu (Dompu) dan Raba Sape (Kota Bima).

4.2. Isu-isu Strategis

Untuk mengawal pemanfaatan sumber daya lokal bagi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat NTB dalam kurun waktu 5 tahun ke depan, perlu dikaji perkembangan lingkungan strategis yang menyertainya dinamika pembangunan Provinsi NTB, baik dalam level global, nasional, regional maupun lokal.

4.2.1. Analisis Lingkungan Strategis Global

Revolusi teknologi transportasi, telekomunikasi, dan informasi telah mengubah wajah banyak negara pada berbagai sisi kehidupan. Perubahan itu antara lain dalam aspek sosial-politik, keamanan dan pertahanan, serta ekonomi dan budaya yang berdampak luas pada berbagai perubahan di kawasan Asia, khususnya Asia Tenggara dan Indonesia. Proses demokratisasi di Indonesia yang bergulir sejak tahun 1998 merupakan efek domino dari gelombang demokratisasi

dunia yang terjadi sejak runtuhnya Uni Soviet pada 1991. Proses demokratisasi global telah membawa implikasi tersendiri bagi gerakan-gerakan islam di negara-negara timur tengah, yang pada bentuk paling ekstrim dipersepsikan sebagai terorisme. Demokratisasi juga melahirkan gerakan gender dan aktualisasi Hak Azasi Manusia (HAM), yang bergerak cepat mempengaruhi kebijakan pembangunan di negara-negara berkembang.

Di bidang ekonomi, globalisasi ditandai munculnya WTO sebagai regulator ekonomi dunia, yang diikuti oleh berbagai aliansi strategis kekuatan-kekuatan ekonomi dunia, seperti Uni Eropa, aliansi ekonomi Amerika Utara (NAFTA), APEC, dan ASEM (Asia Europe Meeting). Globalisasi ekonomi yang tidak diimbangi oleh ketahanan sosial, budaya, pengetahuan dan tatanan nilai lainnya, telah menumbuh-suburkan sikap individualisme, konsumerisme dan hedonisme pada negara-negara berkembang.

Perubahan penting lainnya adalah laju pertumbuhan penduduk dunia yang cenderung meningkat, khususnya di negara kurang berkembang. Pada Juli 2013, penduduk bumi ini telah mencapai 7,2 milyar jiwa, dimana Indonesia berada pada peringkat ke-4 terbanyak dengan penduduk 246 juta jiwa (2012). Implikasinya, secara global arus migrasi antar negara sulit dihindari. Migrasi tenaga kerja untuk kepentingan ekonomi dan pendidikan juga tumbuh dengan cepat. Berkembang pula implikasi sosial negatif berupa *cyber crime*, pembajakan hak cipta, klaim budaya, narkoba dan berbagai bentuk kejahatan transnasional lainnya. Pergerakan manusia antar negara yang diiringi perubahan iklim global akhir-akhir ini juga berimbas pada kualitas lingkungan hidup, dan berkembangnya penyakit baru (*pandemic*).

4.2.2. Analisis Lingkungan Strategis Nasional

Tahun 2014, Indonesia akan memasuki periode RPJMN ke-3 untuk selanjutnya menuju ke taraf akhir perjalanan RPJPN di tahun 2015. Kemajuan pembangunan di berbagai bidang, masih menghadapi sejumlah persoalan, seperti konflik, baik vertikal maupun horizontal. Media mempertontonkan konflik antar elit politik, gejolak separatisme di Aceh dan Papua, konflik horizontal antar warga masyarakat, baik yang bermotif komunal, bermotif radikalisme keagamaan, maupun bermotif kecemburuan sosial seperti konflik-konflik perburuhan. Implementasi otonomi daerah yang tak terencana dengan baik akhirnya menciptakan konflik otoritas antara kabupaten/kota dengan provinsi dalam pemanfaatan ruang, dan antara daerah dengan pusat, serta memicu munculnya kasus-kasus pelanggaran hukum di daerah.

Konflik yang tidak tertangani secara tuntas, tidak adanya kepastian hukum, berkembangnya mafia hukum serta masih lemahnya implementasi *good governance*; akan menciptakan iklim investasi yang tidak kondusif. Di sisi lain, kecilnya minat investasi juga disebabkan oleh minimnya promosi dagang, terbatasnya infrastruktur penunjang, tidak adanya jaminan kepastian berusaha dan inkonsistensi kebijakan.

Selama 1 dekade terakhir, stabilitas ekonomi makro tercapai dan pertumbuhan ekonomi menunjukkan kenaikan, namun masih terjadi fenomena ketidakterkaitan antara pertumbuhan dengan pengangguran. Pertumbuhan ekonomi nasional belum berkualitas, masih bertumpu pada sektor yang miskin serapan tenaga kerja (pertambangan, jasa telekomunikasi, dan konsumsi). Akibatnya secara total nasional tenaga kerja yang terserap masih sedikit. Masih tingginya angka pengangguran merupakan dampak ikutan dari besarnya jumlah penduduk Indonesia. Laju pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi yang tidak diikuti oleh membaiknya kualitas penduduk, menyebabkan akses pelayanan sosial dasar, seperti kesehatan dan pendidikan, bagi sebagian penduduk terkendala.

Bergulirnya otonomi daerah telah melahirkan sejumlah persoalan seperti konflik otoritas, tidak efektifnya dana dekonsentrasi, pembangunan daerah yang sekedar mengejar target PAD, ketidaksiapan SDM dan kapasitas kelembagaan daerah. Pada gilirannya, terjadi ketimpangan pertumbuhan antar daerah. Intensitas pembangunan wilayah barat Indonesia, khususnya pulau Jawa relatif lebih tinggi daripada kawasan timur Indonesia. Tingkat pengawasan pusat terhadap pulau-pulau terluar Indonesia menjadi lemah, sehingga masih kita temukan kasus-kasus penjualan pulau kecil kepada pihak asing. Interaksi dengan negara luar juga menyisakan persoalan kebudayaan. Pergeseran budaya di kawasan Asia Tenggara telah menimbulkan gesekan kepemilikan produk budaya, seperti klaim lagu, kesenian, karya sastra, seni rupa, desain batik, dan lain sebagainya.

4.2.3. Analisis Lingkungan Strategis Regional

Kawasan Timur Indonesia (Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi) dikenal sebagai kawasan yang kaya akan sumber daya alam namun menghadapi tantangan pembangunan yang berat, antara lain: tantangan aksesibilitas antar kawasan, belum terpadu dan sinkronnya pola pengelolaan potensi SDA, perbaikan iklim investasi, ketimpangan infrastruktur, kualitas pelayanan dan penguatan pemerintahan. Rendahnya tingkat aksesibilitas antar kawasan di KTI ditandai masih banyaknya kawasan-kawasan yang terisolasi dari pusat-pusat kegiatan ekonomi seperti daerah perbatasan, pulau-pulau kecil, pesisir, dan

daerah pedalaman. Sentra-sentra produksi yang terdapat di KTI belum memiliki aksesibilitas langsung ke pasar internasional.

Kondisi provinsi-provinsi di regional tengah dan timur masih menghadapi disparitas dalam berbagai aspek pembangunan seperti ekonomi, SDM, budaya, kesehatan, pendidikan dan infrastruktur. Salah satu upaya untuk mengatasi disparitas itu adalah dengan menjalin kerjasama antar daerah.

Wilayah Nusa Tenggara yaitu Bali, NTB dan NTT adalah wilayah yang kaya akan khazanah budaya, dan pada era globalisasi saat ini telah mengalami akulturasi, seperti budaya Lombok dengan Bali, Sumbawa dengan Makassar, Bima dengan Flores, dan lain-lain.

4.2.4. Analisis Lingkungan Strategis Lokal

Ada 3 aspek yang perlu mendapat perhatian di Lingkungan Strategis Lokal, yaitu aspek Kesejahteraan Masyarakat, aspek Pelayanan Umum dan aspek Daya Saing Daerah.

a. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Untuk menatap pembangunan 5 tahun yang akan datang, ada beberapa isu yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

1. Gangguan kamtibmas terutama yang berbau SARA masih berpotensi terjadi. Demikian juga dengan konflik horizontal dan vertikal.
2. Peredaran NAPZA makin meluas baik kuantitas maupun secara kualitas
3. Makin tak terbendungnya pengaruh globalisasi terutama terhadap nilai-nilai luhur budaya dan kearifan lokal NTB.
4. Pengangguran tenaga terdidik makin besar
5. Kualitas dan distribusi penduduk yang belum optimal.

b. Aspek Pelayanan Umum

Pada aspek pelayanan umum, sejumlah isu yang masih akan menjadi pekerjaan rumah pemerintah provinsi NTB adalah :

1. Sistem pendidikan yang sedang dijalankan belum mengarah pada pembentukan manusia NTB yang berkarakter
2. Tingkat partisipasi politik yang makin menurun
3. Kualitas pelayanan publik khususnya pelayanan sosial masih belum optimal
4. Kualitas dan kuantitas sarana pelayanan sosial belum sebanding dengan kebutuhan masyarakat

5. Ketidakpastian hukum masih dirasakan dalam banyak kasus hukum
6. Jumlah kasus sengketa lahan yang makin banyak
7. Peran perempuan pedesaan belum optimal dalam menghadapi tantangan pembangunan
8. Derajat kesehatan ibu dan anak yang belum memadai
9. Laju pertumbuhan penduduk cukup tinggi
10. Jumlah Penyandang masalah kesejahteraan sosial yang makin besar
11. Perdagangan manusia (*trafficking*) masih terjadi dan cenderung meningkat.

c. Aspek Daya Saing Daerah

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di NTB, pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh aspek daya saing daerah perlu mendapat perhatian. Sejumlah isu yang mengemuka terkait aspek daya saing daerah ini adalah :

1. Nilai tukar petani yang belum membaik secara signifikan
2. Kualitas produk olahan lokal belum mampu bersaing di level nasional maupun internasional
3. Mekanisme dan besaran penyaluran modal bagi UMKM belum sesuai target
4. Angka pengangguran terbuka masih cukup tinggi
5. Perkembangan ekonomi antar kawasan belum seimbang
6. Iklim investasi belum didukung oleh regulasi dan sarana pendukung lainnya
7. UMR di beberapa kabupaten/kota masih di bawah rata-rata
8. Jumlah PAD belum tergali secara optimal
9. Pemanfaatan potensi SDA masih terbatas
10. Sejumlah sarana prasarana wilayah belum terbangun dengan baik serta utilitasnya belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat
11. Kualitas lingkungan perkotaan dan pedesaan yang belum efektif menjawab kebutuhan masyarakat yang bergerak cepat
12. Akses antar kawasan di beberapa titik masih belum terbangun dan berfungsi dengan baik
13. Terjadinya degradasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
14. Perubahan iklim dan pergeseran musim yang akan mempengaruhi produktifikasi sejumlah komoditi masih terjadi
15. Kesiapsiagaan menghadapi bencana belum optimal.

Secara umum, isu strategis yang dihadapi oleh Provinsi NTB ke depan disimpulkan sebagaimana gambar berikut.

Gambar:
Isu Strategis Provinsi Nusa Tenggara Barat 2013-2018

